

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN  
KLASTER IKAN DIDESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh :  
**USROTUL HASANAH**

**ABSTRAK**

Panarukan memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Situbondo. Potensi tersebut belum terkelola dengan baik terutama dalam mengorganisasi para pengolah ikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pemberdayaan masyarakat pesisir dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan klaster ikan di Desa Kilensari Panarukan belum maksimal karena tidak ada upaya yang bersifat pemeliharaan klaster ikan di Desa Kilensari untuk selanjutnya. Adanya faktor yang menjadi kendala yaitu, sulitnya merubah pola pikir dan paradigma komunitas sasaran, Adanya keterbatasan dana, dan Tingkat pendidikan rendah

Adapun yang menjadi saran dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu sosialisasi secara rutin, meningkatkan pelatihan, pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat, peningkatan alokasi anggaran, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pesisir.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan klaster ikan.

**ABSTRAK****EMPOWERMENT COASTAL COMMUNITIES CLUSTER THROUGH THE DEVELOPMENT OF FISH IN THE VILLAGE OF KILENSARI PANARUKAN SUB-DISTRICT SITUBONDO**

Panarukan have the potential high economics and widely known also as one of the areas producer anchovies largest in the Situbondo District. The reality can't managed well especially in organize the fish processing. Research purposes was how empowerment the coastal communities and obstacles faced in empowering the coastal communities through the development of cluster fish. This research using type research descriptive qualitative.

The result of this research showed that empowerment the community through cluster development fish on the Village of Kilensari Panarukan not maximum because not the efforts that in the nature of cluster maintenance of fish on the Village Kilensari for later. The factors becomes an obstacle, the difficulty of change the paradigm think and a community objective, that the lack of funds, low education level.

As for who became advice empowerment the coastal communities that is socialization routinely, increase training, assistance and the provision of motivation to community groups, increased allocations budget, improved knowledge and ability the coastal communities.

Keywords: empowerment coastal communities , cluster development fish

## PENDAHULUAN

Keberadaan daerah pesisir pantai yang ada di Indonesia merupakan realitas yang harus diterima sebagai konsekuensi sebagai daerah kepulauan, wilayah pesisir pantai merupakan sebuah daerah yang memiliki karakteristik yang unik baik secara kultural maupun sosial masyarakatnya.

Kondisi dan karakteristik wilayah pesisir tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mengelola secara bijak sebagai bagian yang terintegrasi dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah pesisir memiliki nilai strategis dalam wilayah pembangunan nasional karena memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kawasan pesisir pantai memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia yang akan mendatang. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi sumber daya alam.

Kawasan daerah pesisir pantai juga memberikan dampak pada pengelolaan lingkungan hidup yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya sehingga dapat menggerakkan industri pariwisata bahari.

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir pantai sering kali menghadapi berbagai ancaman dari aspek ekologi berupa terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial berupa aksesibilitas dan kurangnya masyarakat lokal dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman tersebut pengelolaan pesisir pantai harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu melalui cluster perikanan. Sehingga pengelolaan daerah pesisir pantai harus memperhatikan keserasian dan

keseimbangan lingkungan sehingga dapat menguntungkan secara ekonomi kepada masyarakat pesisir yang bermukim di daerah tersebut tanpa merugikan ekologi lingkungan.

Orientasi pembangunan pada masa lalu lebih difokuskan pada wilayah daratan (*mainland*) dan belum diarahkan ke wilayah laut (pesisir pantai). Masih rendahnya kesadaran, komitmen, dan *political will* dari Pemerintah dalam mengelola daerah pesisir inilah yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan potensi daerah pesisir. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pasar, listrik, media informasi dan komunikasi menyebabkan tingkat pendidikan (kualitas SDM), tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pesisir rendah. Pemanfaatan sumberdaya yang berlebih dan tidak ramah lingkungan yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, belum adanya kebijakan yang terintegrasi lintas sektor di pusat dan daerah serta rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Daerah pesisir pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal ini, sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, maka kewenangan pengelolaan Daerah pesisir diserahkan kepada daerah sepenuhnya. Berdasarkan UUD 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, maka kewenangan untuk mengelola

potensi sumber daya alam dikelola secara sah oleh daerah dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemberdayaan merupakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya. Sejalan dengan itu, menurut Suharto (2005:58). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri.

Kabupaten situbondo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan untuk mengelola pesisir di daerahnya. Letak geografis Kota situbondo yang memiliki daerah pesisir mengharuskan adanya pengelolaan secara

terpadu, diantaranya adalah pesisir desa kilensari yang berada di Kecamatan Panarukan.

Berkaitan dengan pemberdayaan, sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pemerintah menggalakkan pengembangan komoditi dengan pola OVOP/*one village one product* yang berbasis cluster. Program OVOP ini sangat cocok dilaksanakan di pesisir kilensari kecamatan panarukan mengingat produk ikan laut sudah menjadi produk utama di daerah tersebut. Usaha ini menjadi andalan sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Panarukan. Pengembangan komoditas unggulan tersebut dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat lewat penguatan kapasitas pengembangan cluster ikan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pengolah ikan di pesisir panarukan serta meningkatnya kegiatan usaha mikro dan kecil yang dilakukan komunitas nelayan pengolah ikan.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan hasil produksi perikanan secara umum hasil tangkapan nelayan  $\pm 16.071,03$  ton tahun 2018 dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga potensi perikanan di Pesisir panarukan dari hasil tangkapan nelayan sedangkan hasil 4.000 ton/tahun merupakan produksi ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Situbondo.

Tabel 1.1 Produksi hasil Ikan Di Kabupaten Situbondo Tahun 2018

No	Jenis Ikan	Volume
1	Ikan Layang	2.315,53
2	Kembung	415,50
3	Kerapu	422,46
4	Tongkol	2.414,51
5	Bambangan	719,91
6	Selar	579,66
7	Teri	1,194,55
8	Lemuru	1.329,35
9	Layur	995,59
10	Petek	303,24
11	Cucut	417,75

12	Manyung	88,01
13	Pari	59,71
14	Beloso	179,98
15	Udang	417,46
16	Kakap	267,73
17	Kurisi	422,46
18	Cumi	758,04
19	Bawal	489,23
20	Belanak	797,83
21	Rajungan	356,30
22	Beronang	658,59
23	Kepiting	86,77
24	Ikan Lainnya	380,87
Total		16.071,03

Sistem pemasaran ikan laut segar dijual dengan sistem ikan dikirim kepada tengkulak (*broker*) di keresidenan besuki raya sampai surabaya, sesampai di pasar harga beli ikan ditentukan oleh pihak *broker*, baru diinformasikan kepada nelayan sehingga nilai tawar bagi nelayan tidak memiliki. Untuk transaksi jual beli ikan laut seperti ini sudah berjalan sejak memulai usaha nelayan di pesisir panarukan.

Pada sisi lain, potensi yang besar tersebut belum dapat terkelola dengan baik terutama dalam mengorganisasi para pengolah ikan. Pengorganisasian para nelayan ikan laut kering dalam satu wadah kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan pola cluster. Dengan pola Klaster, maka para nelayan yang ada wilayah tersebut dapat saling mendukung, melengkapi serta bekerja bersama dan untuk maju bersama-sama. Dalam mencapai hal tersebut tentu diperlukan strategi dan intervensi terhadap komunitas sasaran. Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasi potensinya. Peningkatan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri komunitas

adalah yang dikenal dengan penguatan kapasitas

Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87) Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan.

Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah yang umumnya dinilai tidak berdaya. Pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Penerapan proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, pendudukan dan pemeliharaan.

Tabel 1.2

Pembagian Klaster berdasarkan tempat pendaratan perahu

No.	wilayah	Jumlah kapal	Klaster
1.	Karang Kongo	12	6
2.	Kilensari Utara	14	7
3.	Kilensari Selatan	6	3
4.	Tanah Anyar	4	2
5.	Somangkaan	6	3
Jumlah		42	21

Sumber: KUD Minah

Mengingat keberadaan nelayan yang ada di pesisir Panarukan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan memiliki potensi yang baik sehingga perlu dikelola dan dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah daerah lewat SKPD terkait perlu untuk melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Melalui Pengembangan Klaster Ikan”**

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Definisi pemberdayaan masyarakat sangat beragam. Menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Mardikanto dkk (2013:28) pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya.

Menurut World Bank dalam Mardikanto dkk (2013:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk

memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Dubois dan Miley dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:116) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

1. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
2. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
3. Klien harus merasa dirinya sebagai

- agen bebas yang dapat mempengaruhi.
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
  5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
  6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
  7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri. Anthony Bebington dalam Mardikanto dkk (2013:30) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dengan titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam pemberdayaan ini, upaya yang penting adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana fisik, meliputi irigasi, jalan, listrik maupun bidang sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang

lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi Wrihatnolo dan Nugroho (2007:205), yaitu:

1. Upaya Pemberian Kepastian  
Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme dan tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan masyarakat berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu
2. Upaya Pemihakan  
Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Upaya pemihakan utamanya dilakukan dengan cara mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah
3. Upaya Perlindungan  
Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari

interaksi, karena hal itu akan mengerdikan yang kecil dan menglulaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

### **Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Suharto (2005:68) adalah:

- a) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif
- b) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
- c) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- d) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat
- e) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut
- f) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang
- g) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri
- h) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena

- pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan
- i) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif
  - j) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus dan evolutif
  - k) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat di atas, dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut. Pemikiran prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto dalam Mardikanto (2013:108):

- a. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
- b. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok maupun kelembagaan yang lain.
- c. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan dari pihak luar.
- d. Partisipatif, artinya keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
- e. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
- f. Demokrasi, yang memberikan hak

kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*

- g. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
- h. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
- i. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
- j. Desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten atau kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya bagi kemakmuran masyarakat dan kesimbangan pembangunan.

#### Dimensi dan Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer dalam Suharto (2005:63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif. Parson *et.al.* dalam Suharto (2005:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator

keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Schuler *et.al* dalam Suharto (2005:64) mengembangkan beberapa indikator, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan desa atau kelurahan.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan dan lain-lain.

Mardikanto (2005:291) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan
- b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan

program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan

- d. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian
- e. Jumlah dana yang digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
- f. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- g. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- h. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan
- i. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tergabung dalam Cluster ikan

### **Pendekatan Pemberdayaan masyarakat**

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87) pemberdayaan dapat dilakukan melalui : pemungkinan, penguatan, perlindungan, pendudukan dan pemeliharaan.

1. Pemungkinan (*enabling*)  
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan (*empowering*)  
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan (*protecting*)  
Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Pendukungan (*supporting*)  
Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan (*foresting*)  
Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan bersama.

Sedangkan menurut Suharto (2005:95) pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pendampingan sosial yang berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi, yakni: pemungkinan atau fasilitasi (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukungan (*supporting*).

- a. Pemungkinan atau Fasilitasi (*enabling*)  
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa pekerja sosial berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi atau

negoisasi, serta melakukan manajemen sumber. Program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan masalah sosial umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada disekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan ekonomi maupun birokrasi, pekerja sosial terpanggil untuk mampu memobilisasi dan mengkoordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat dijangkau oleh klien. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup), sumber interpersonal (system pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksi formal dengan orang lain), dan sumber sosial (respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya). Pengertian manajemen disini mencakup pengkoordinasian, pensistematiasian, dan pengintegrasian. Pengertian manajemen juga meliputi pembimbingan, kepemimpinan, dan kolaborasi dengan pengguna atau penerima program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tugas utama petugas sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan masalahnya

- b. Penguatan (*empowering*)  
Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Dalam hal ini pendampingan berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta

bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan. Sebagai fungsi dalam pendampingan sosial, pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan, ketimbang sebagai sebuah hasil dari suatu kegiatan. Pendidikan sangat terkait dengan pencegahan berbagai kondisi yang dapat menghambat kepercayaan diri individu dan masyarakat, yang merupakan bentuk kerjasama antara pekerja sosial (sebagai guru dan pendamping) dengan klien (sebagai murid dan peserta didik). Peserta didik adalah *partner* yang memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan proses saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga pekerja sosial dan klien pada hakikatnya dapat menjadi pendidik dan peserta didik sekaligus.

c. Perlindungan (*protecting*)

Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi

prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

Konsultasi dilakukan sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Pekerja sosial membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau kemasyarakatan yang pernah diperoleh semasa hidupnya. Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan sosial dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktek pekerjaan sosial pada umumnya yaitu: pemahaman kebutuhan, perencanaan dan penyeleksian program, penerapan program, evaluasi dan pengakhiran.

d. Pendukung (*supporting*)

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007:117) Proses pemberdayaan hendaknya *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). Pada gilirannya diharapkan akan terwujud kapasitas ketahanan masyarakat secara lebih bermakna, bukan sebaliknya bahwa stimulant dan proses yang ada menjebak masyarakat pada suasana yang penuh ketergantungan.

## Karakteristik Masyarakat Pesisir

### Pengertian Masyarakat Pesisir

Menurut Satria dalam Ikhsani (2011) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim.

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya dan sangat beragam identitas, spesialisasi pekerjaan, derajat sosial, pendidikan serta latar belakang budayanya. Adapun berbagai tipe pekerjaan dari masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

1. Nelayan penangkap ikan dan hewan-hewan laut lainnya
2. Petani ikan (budidaya air payau atau tambak dan budidaya laut)

3. Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut
4. Pemilik atau pekerja industri pariwisata
5. Pemilik atau pekerja pertambangan dan energy
6. Pemilik atau pekerja industri maritim (galangan kapal)

### Karakteristik Masyarakat Pesisir

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa di prediksi. Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini bersifat akses terbuka (*open access*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, dengan demikian resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas dan terbuka.

Menurut Firth dalam Satria (2015:8) masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat tani yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana, eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerjasama, sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistem dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.

Adapun berbagai aspek-aspek masyarakat pesisir adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengetahuan  
Pengetahuan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya

kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Pengetahuan-pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) seperti teknik penangkapan ikan, teknik pemeliharaan sampan dan teknik selam-menyelam tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan.

## 2. Sistem Kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut antara lain tradisi *suwonke suhu* atau dukun-dukun dalam rangka mendapatkan keselamatan saat melaut dan memperoleh hasil tangkapan yang baik. Sistem kepercayaan hingga saat ini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun dengan seiring perkembangan teologis dan meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah *ritualisme*. Maksudnya, suatu tradisi yang terus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai instrument stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

## 3. Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Menurut Pollnac dalam Satria

(2015:20) pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Peran perempuan ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penangkap ikan karena pria mungkin menangkap ikan hanya kadang-kadang sementara perempuan bekerja sepanjang tahun. Istri nelayan pada umumnya hanya menjalankan fungsi domestik dan ekonomi, dan tidak sampai pada wilayah sosial politik. Namun sebenarnya isteri nelayan juga kreatif dalam menciptakan pranata-pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial pada komunitas nelayan. Hal ini tampak, misalnya pada pengajian, arisan serta simpan pinjam yang juga memiliki makna penting dalam membantu dalam mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi.

## 4. Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat juga menarik dicermati secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan banyak masyarakat nelayan yang memiliki status yang relatif rendah. Rendahnya posisi sosial nelayan juga diakibatkan keterasingan nelayan. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat bukan nelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan banyaknya alokasi waktu nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan daripada untuk bersosialisasi dengan masyarakat bukan nelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif

berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **Pengembangan Klaster Ikan**

#### **Pengembangan Klaster**

Menurut Bank Indonesia (2015:13) Klaster adalah sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi bersifat komplementer. Kedekatan produk dari perusahaan-perusahaan ini pada tahap awal memacu kompetisi yang mendorong adanya spesialisasi, peningkatan kualitas, serta mendorong inovasi dalam diferensiasi pasar. Klaster disebabkan oleh keunggulan daya saing, sejarah dan institusi. Keunggulan daya saing berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kondisi penawaran dan permintaan, hubungan industri dan persaingan lokal yang memberikan keuntungan bagi perusahaan lokal. Sejarah, berkaitan dengan faktor yang mendasari industri atau penggunaan teknologi yang menyebabkan keunggulan kompetitif. Institusi adalah kelembagaan formal dan informal yang mempengaruhi pengembangan Klaster guna mendukung kreasi, difusi, dan pengetahuan.

#### **Tujuan pengembangan Klaster**

Tujuan pelaksanaan program pengembangan lembaga lokal dalam rangka mewujudkan Klaster modern, antara lain:

1. Menumbuhkan soliditas kelompok sehingga dapat meningkatkan interaksi antar aktor pembentuk Klaster yang mengarah pada rasa saling memiliki diantara kelompok
2. Mewujudkan kelompok pengolah ikan teri kering yang mempunyai kemandirian dalam aspek permodalan maupun pemasaran
3. Mengembangkan keterampilan pengolah untuk membuat produk

turunan ikan teri higienis sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk ikan teri kering

4. Memfasilitasi penguatan jalur distribusi dan pemasaran produk ikan teri kering beserta produk turunannya
5. Memfasilitasi perluasan jaringan pengolahan ikan kering dari subsistem dari hulu sampai hilir
6. Mengembangkan sinergi positif antar unit usaha sehingga dapat menciptakan *positioning* kualitas ikan kering khas pulau pasaran yang menjadi trigger terwujudnya *demand condition* yang *sustainable*.

#### **Sasaran Program Pengembangan Klaster**

Sasaran atau *output* yang diharapkan dalam pelaksanaan program pengembangan Klaster antara lain:

1. Terbentuknya kelompok pengolah ikan teri kering yang solid dan mandiri sehingga dapat meningkatkan daya tawar dalam rangka menghadapi *end user*
2. Terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro dengan fasilitasi kelompok yang solid
3. Terbentuknya kelompok pengolah ikan teri kering yang terampil dalam membuat produk turunan sehingga meningkatkan nilai tambah
4. Terbentuknya sistem distribusi dan pemasaran ikan teri kering beserta produk turunannya yang dikelola oleh kelompok secara solid
5. Terwujudnya jaringan pengolahan ikan teri kering yang solid dari subsistem hulu sampai hilir
6. Terwujudnya unit usaha dengan *positioning* produk ikan teri kering yang berdaya saing (*competitiveness*) tinggi karena adanya *demand condition* produk yang berkelanjutan.

#### **Peranan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Sutrisno dalam Modim (2012:20)

menyatakan bahwa kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

Menurut Muflich dalam Modim (2012:20), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam. Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi, saat ini hampir semua departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam renstranya masing-masing. Demikian juga di daerah, hampir semua dinas/instansi juga memiliki program yang serupa.

Beberapa daerah bahkan membentuk unit kerja otonom untuk mengawal proses koordinasi yang lebih baik dan menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dibawah gubernur/bupati/walikota yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pengembangannya, tidak luput dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Banyak program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah melalui Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen seperti

PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PENP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain sebagainya. Program-program tersebut diyakini sebagai salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian masyarakat. Dari sekian banyak program yang digulirkan, sebagian besar mengarah pada aspek kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah pemberdayaan masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber pendapatan untuk hidup layak. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator) dan fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui UKM. Puspito dalam Modim (2012:22) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Sedangkan menurut Soekanto dalam Modim (2012:22) mengaitkan antara peranan dan kedudukan dimana suatu kegiatan baru dapat disebut suatu peranan jika telah melaksanakan semua yang berkenaan dengan hak dan kewajibannya.

Lambolo (2010:32) menyatakan bahwa arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta

mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan. Rasyid dalam Lambolo (2010:32) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Lambolo (2010:36) mengatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan.

Ndraha dalam Lambolo (2010:36) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau

pemberdayaan. Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur

- segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Pemerintah sebagai dinamisator  
Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
  - c. Pemerintah sebagai fasilitator  
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

### Penelitian Terdahulu

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Di Kabupaten Tuban (Studi Kasus di Desa Gadon, Kecamatan Tuban) dilakukan oleh Wiwik UNESA tahun 2011 dengan kesimpulan : 1. Pengembangan Alternatif Mata Pencaharian, Pengembangan mata pencaharian alternatif baru di Desa Gadon telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Akses Terhadap Modal, Di Desa Gadon, penyediaan modal di berikan dengan sistem simpan pinjam agar uang diberikan tersebut bisa berputar terus dan tidak berhenti di salah satu warga. Pengelolaan di lakukan oleh UPKU dengan pengelolaan mandiri, dalam artian pengelolaan tersebut dilakukan oleh pengurus UPKU itu saja tanpa ada campur tangan dari pemerintah Kabupaten. Pihak dari Kabupaten dan Provinsi hanya sesekali memantau, bila ada kekurangan atau masalah pendanaan cukup memberikan penguatan modal serta membantu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Gadon. 3. Akses Terhadap Teknologi , Saat pertama kali P2MPP di terapkan di Desa Gadon, masyarakat telah diberikan pelatihan dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan usaha masyarakat Gadon. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kelanjutannya dikarenakan sasaran dari program ini yang merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang rendah, sehingga masyarakat masih belum memahami bahwa penggunaan teknologi sangat bermanfaat untuk kegiatan usaha masyarakat. 4. Akses Terhadap pasar, Dalam mengakses pasar dan menjangkau pembeli, masyarakat Gadon tidak merasa kesulitan, karena masyarakat sebelumnya telah memiliki pelanggan, maka masyarakat kurang merespon mengenai arahan yang diberikan pemerintah. 5. Pengembangan aksi kolektif di Desa Gadon adalah hal yang paling menonjol selain masalah permodalan. Melalui P2MPP masyarakat menjadi sering melakukan musyawarah dalam menentukan setiap keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan aksi kolektif masyarakat Gadon telah terpenuhi.
2. Pengembangan Wilayah Pesisir Kabupaten Barru melalui Klaster Penangkapan Ikan Laut Oleh Supomo (2008) dengan kesimpulan : 1. Dengan

berlakunya otonomi daerah yang dimulai awal tahun 2001 ini, di mana setiap daerah kabupaten diberikan wewenang atau otoritas membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi sumberdaya alam, potensi keunggulan daerah, dan kemampuan sumberdaya manusianya, maka sistem pembangunan ekonomi secara otomatis telah berubah dari sistem pembangunan sektoral menjadi sistem pembangunan wilayah. 2. Agar tidak terjebak pada keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini maka seyogyanya pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakannya dan skala prioritas pembangunannya harus hati-hati dengan memperhatikan dan mendahulukan pembangunan ekonomi yang menjadi basis ekonomi rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang menjadi bagian terbesar mata pencaharian masyarakat setempat di wilayah masing-masing. 3. Kabupaten Barru yang kondisi alamnya merupakan pesisir pantai laut maka sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan penangkap ikan di laut, budidaya ikan dan rumput laut, serta budidaya tambak bandeng, udang, dan juga rumput laut, maka basis ekonomi rakyatnya adalah: budidaya tambak dan laut, serta nelayan penangkap ikan. Sedangkan sektor pertanian sebagai basis ekonomi rakyat untuk masyarakat pedesaan di pedalaman. 4. Salah satu pelaksanaan program pengembangan basis ekonomi rakyat yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Barru baru-baru ini adalah pengembangan klaster penangkapan ikan laut. Segi keunggulan sistem klaster ini adalah semua dinas-dinas dan Bappeda di lingkungan Kabupaten Barru berkolaborasi positif untuk pengembangan usaha masyarakat khususnya penangkapan ikan laut. Bahkan semua pihak stake-holder yang ada kaitannya dengan usaha

penangkapan ikan laut tersebut diajak bermusyawarah, sehingga masing-masing tahu posisinya dan tahu apa yang harus dilaksanakan. Khususnya perusahaan pemasok dan pembeli pada posisi tawar yang seimbang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya menggambarkan suatu keadaan dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2011: 98) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan cluster ikan dengan mengungkap fenomena dilapangan yang bersifat empiris yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

Melalui model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, maka peneliti akan memperoleh penjelasan dan gambaran atas pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan cluster ikan (studi pada Masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo).

### **Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai

fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan clussterikan dianalisis dengan proses pendekatan menurut Suharto yaitu :
  - a) Pemungkinan atau fasilitasi (*Enabling*) dengan melihat pemanfaatan sumber-sumber yang ada baik berupa personal, sumber sosial, maupun sumber interpersonal.
  - b) Penguatan kapasitas (*Empowering*) dengan melihat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
  - c) Pendukungan (*Supporting*) dengan melihat kerjasama antara fasilitator dan lembaga eksternal lainnya.
  - d) Pemeliharaan (*Foresting*) dengan melihat respon atau tanggapan masyarakat terhadap kegiatan tersebut dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Lokasi ini dipilih karena Desa Kilensari merupakan Desa yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Desa Kilensari Panarukan telah di kenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Situbondo.

#### **Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dimulai dari akhir bulan Maret hingga akhir bulan Mei 2019. Rencana awal, penulis ingin melakukan penelitian mulai bulan januari, namun karena berbagai kendala penulis mulai melakukan aktivitas penelitian, mulai dari pengamatan lokasi penelitian sampai pada tahap pencarian informan, dan akhirnya pada saat itu penulis berhasil mewawancarai seorang informan pada bulan februari.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperlukan peneliti. Data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai hasil pengumpulan yang dilakukan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi mengenai Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan clusster ikan (studi pada Masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)

#### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder bukan data yang didapat langsung oleh peneliti, melainkan telah melalui tangan kedua dan seterusnya. Data sekunder dapat berupa draf, notulensi, naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan clusster ikan (studi pada masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)

### **Sumber Data**

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

a) Informan

Sumber data ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan (studi pada Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo).

b) Dokumen-Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi: Undang-undang, Peraturan Daerah, catatan-catatan, arsip-arsip, foto dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kluster ikan (studi pada masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:62) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Clusster Ikan

b) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen

seperti surat menyurat, dan lain sebagainya. Sumber data ini, merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Clusster Ikan.

c) Observasi

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian.

### Teknik Analisis Data

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Clusster Ikan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Setelah data terkumpul kemudian hal yang dilakukan adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Dalam hal pengumpulan data peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan data wawancara, dokumentasi dan

observasi yang telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)  
Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusoin Drawing*)  
Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

### Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi suatu yang penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam penelitian dengan data dan analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dan kemungkinan terjadinya distorsi atas sebuah informasi data maupun hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi.

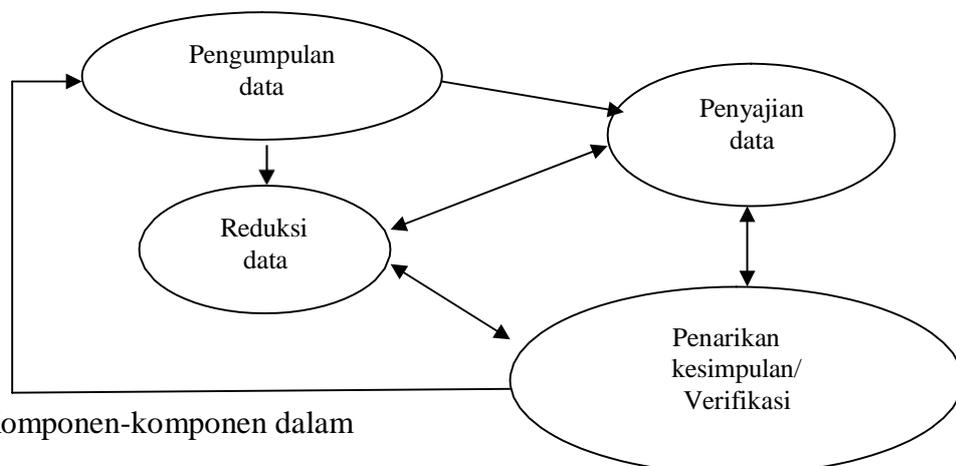
Menurut Sugiyono (2015:273), menyatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



Gambar 4.1 : Komponen-komponen dalam analisis data

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:247)

3. Triangulasi Waktu  
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber dan atau metode. Penggunaan salah satu atau dua macam triangulasi ini dalam pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas ketersediaan informasi yang dapat diperoleh peneliti melalui triangulasi tersebut. Dengan cara membandingkan sumber dan atau metode, maka data yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian.

Menurut Patton dalam (Moelong, 2012:330), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

1. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang

pemerintahan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategis atau cara yaitu pengecekan derajat kepercayaan penentuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **Gambaran Umum Masyarakat Desa Kilensari**

Secara geografis sentra pengolahan yang ada di Kota Situbondo pada umumnya terletak di sepanjang pantai yaitu pada Kecamatan Panarukan, Kecamatan Jangkar. Sebagai lokus sentra pengolahan ikan yang terbesar di Kabupaten Situbondo adalah sentra pengolahan ikan yang berlokasi di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan.

Kilensari telah dikenal luas sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Situbondo. Produk pengolahan ikan yang menjadi prioritas pengolahan ikan adalah ikan jenis teri yang terdiri dari teri nasi, teri nilon, dan teri jengki. Namun selain itu pengolah juga mengusahakan ikan kering jenis lainnya, seperti ikan tanjan, cumi, tembang dan bingseng, dan lain-lain serta pemindangan ikan. Produk teri nasi di Desa Kilensari ini mempunyai potensi ekspor yang cukup besar karena dalam satu siklus produksi dapat menghasilkan  $\pm 1$  ton teri kering. Disamping itu ketersediaan bahan baku selalu terjaga karena ikan teri tergolong sebagai mahluk hidup dengan tingkat regenerasi yang tinggi dan didukung oleh wilayah penangkapan ikan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan angin musim.

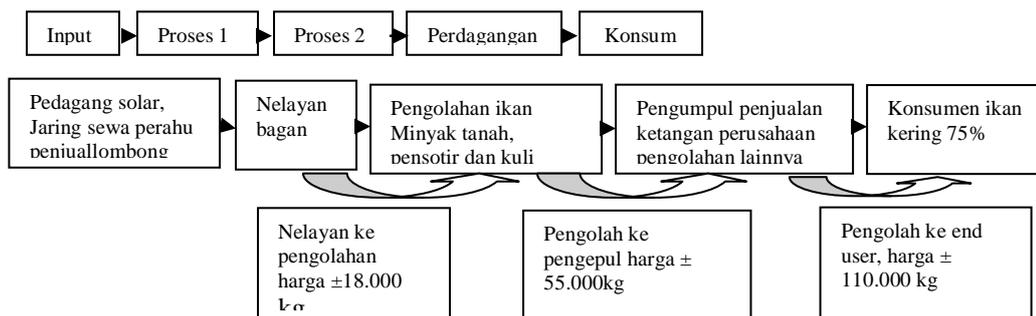
Selain mempunyai kapasitas produksi yang potensial menembus pasar ekspor, usaha pengolahan ikan kering Kilensari juga menyerap tenaga kerja yang sebagian besar bekerja sebagai buruh

pensortir ikan selama proses penjemuran. Sebagian besar nelayan dan pengolah ikan kering sudah terbiasa dengan aktivitas disektor perikanan. Masyarakat Kilensari juga memiliki ikatan keluarga yang secara sosial terhubung dengan ikatan darah. Ikatan keluarga ini turut membentuk struktur interaksi dalam masyarakat yang saling berdekatan. Hampir seluruh penghuninya bermatapencarian sebagai pekerja atau pengolah ikan kering dari hulu sampai hilir yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan adanya industri pengolahan ikan kering yang terintegrasi dalam satu kawasan tersebut maka sangat potensial untuk dikembangkan dengan pola klaster atau yang populer disebut *One Village, One Product* (OVOP).

Berdasarkan survei yang dilakukan jenis profesi usaha masyarakat Kilensari sebagian besar adalah pengolah ikan sebanyak 39 (73,58%) orang yang berprofesi sebagai pengolah aktif. Selain itu juga terdapat profesi sebagai pedagang pengumpul sebanyak 5 (9,43%) orang. Disamping itu terdapat profesi lainnya sebanyak 8 responden dengan rincian 2 orang sebagai pengolah dengan usaha sampingan yaitu pembuatan jaring ikan dan penjual solar. Sedangkan 6 orang lainnya berprofesi sebagai perebus ikan di Laut, perebus ikan di darat, penjual kardus, dan penjual minyak tanah dan solar. Usaha pengolahan ikan teri kering di Kilensari melibatkan beberapa unit usaha lain, misalnya nelayan bagan pada subsistem hulu dan pedagang pengumpul pada subsistem hilir. Secara rinci model hubungan klaster pengolahan ikan teri kering dari hulu sampai hilir diilustrasikan analisis rantai nilai sebagaimana pada gambar.

Gambar 5.1 Rantai Nilai Pengolahan Ikan teri

Selanjutnya hasil survei diperoleh informasi sebanyak 20 (60%) pengolah ikan teri kering dari total pengolah di Kilensari rata-rata telah menekuni usaha tersebut lebih dari 15 tahun. Pengolah ikan di Kilensari yang terlama adalah 43 tahun dan paling baru adalah 1 tahun. Paling banyak (modus) pengolah ikan telah melakukan usahanya selama 20 tahun sebanyak 8 pengolah. Aspek lama usaha dapat mencerminkan bahwa pengolah telah mempunyai keahlian dalam pengolahan ikan kering sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha yang *feasible*. Permasalahan umum yang dihadapi pengolah dalam kegiatan usahanya adalah persaingan perolehan bahan baku di bagan, hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mempunyai kelembagaan yang kuat untuk bersama-sama menentukan harga. Selain itu pada subsistem hilir pengolah mempunyai kebiasaan menjual produknya dalam bentuk ikan teri kering mentah yang dikirim kepada pengumpul di Jakarta dengan sistem kepercayaan. Saluran pemasaran tunggal tersebut dimanfaatkan oleh pengumpul untuk mengambil margin keuntungan sebesar-besarnya melalui penentuan harga secara sepihak. Hal ini mengakibatkan pengolah sering mengalami kerugian karena harus menutup biaya operasional dalam mencari ikan di bagan.



### Aspek Sumber Daya Manusia

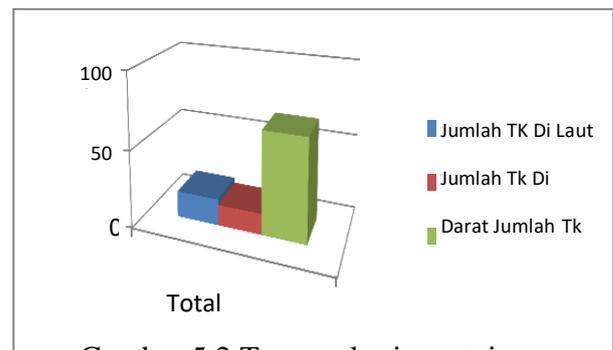
Sumber daya manusia yang dibutuhkan pada kegiatan pengolahan ikan teri kering dari hulu sampai hilir dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu :

- Tenaga kerja di laut yaitu tenaga kerja yang mencari ikan di bagan yang meliputi nahkoda kapal, tenaga perebus ikan di kapal dan anak buah kapal (ABK).
- Tenaga kerja di darat yaitu tenaga kerja yang tugasnya menghamparkan ikan hasil rebusan di kapal untuk kemudian dijemur sampai pada proses *packing* untuk dikirim ke pengumpul di Jakarta atau dijual di pasar lokal Lampung.
- Tenaga kerja pensortir ikan yaitu tenaga kerja yang tugasnya memisahkan ikan kering berdasarkan jenis ikan sehingga ikan dapat seragam sebelum dipasarkan.

Nelayan di Desa Kilensari terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari:

- Nelayan bagan adalah nelayan yang menyediakan bahan baku ikan kepada pengolah. Nelayan bagan tidak mendaratkan hasil tangkapannya karena alasan efisiensi, sehingga Nelayan bagan menunggu pengolah yang akan datang untuk membeli bahan baku ikan segar dengan harga yang telah ditetapkan oleh nelayan bagan itu sendiri. Hal inilah yang sering menjadi konflik antara pengolah dan nelayan bagan karena posisi tawar pengolah yang tidak diperhitungkan dalam rantai nilai.
- Pengolah ikan teri adalah individu yang memberikan nilai tambah terhadap ikan teri segar menjadi produk olahan ikan. Kelompok pengolah terdiri dari 6 kelompok, yaitu 5 kelompok pengolah ikan teri kering dan 1 pengolah produk turunan ikan teri. Setiap kelompok memiliki anggota 6-10 orang dengan 1 ketua kelompok yang diharapkan dapat menjadi forum komunikasi antar

pengolah. Peran ketua kelompok pengolah yang memfasilitasi aspirasi pengolah kepada pihak pemerintah, perbankan, maupun antar kelompok pengolah. Masing-masing anggota kelompok pengolah ikan teri memiliki peran dalam membuka saluran pemasaran, karena sistem penjualan hasilolahan langsung dikirim oleh individu pengolah ke pengumpul tanpa bantuan ataupun fasilitasi dari pihak intermediasi.



Gambar 5.2 Tenaga kerja rantai pengolahan ikan kering

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebagaimana Grafik, diperoleh informasi bahwa aktivitas yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam rantai pengolahan ikan kering adalah pada kegiatan pensortiran ikan kering. Jumlah tenaga pensortir yang dibutuhkan oleh 5 pengolah mencapai 10 tenaga kerja dan seluruhnya berasal dari Desa Kilensari, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha (*business process*) pengolahan ikan kering ini sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencari ikan di bagan sekaligus melakukan perebusan ikan di kapal untuk 3 pengolah sebanyak 9 tenaga kerja. Tenaga kerja yang bertugas di darat untuk menghamparkan sampai *packing* ikan dalam kardus untuk 4 pengolah yaitu sebanyak 5 tenaga kerja.

Pada umumnya nelayan Kilensari banyak menggunakan payang dan bagan perahu sebagai sarana alat tangkap ikan. Nelayan payang yang langsung mengantarkan hasil tangkapan ke pengolah. Biasanya pelanggan nelayan

payang adalah pengolah yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli ikan di tengah laut. Kualitas ikan yang ditawarkan oleh nelayan payang pun sangat jauh berbeda dengan bagan perahu. Ikan teri yang sudah diperlakukan dengan es menyebabkan bobot ikan bertambah dan kesegaran ikan sudah berkurang. Selain itu terdapat nelayan menggunakan bagan perahu (congkel) sebagai alat penangkap ikan. Bagan perahu memiliki kelebihan dalam hal mobilitas dan hasil tangkapan, namun membutuhkan bahan bakar solar yang tidak sedikit. Biasanya nelayan yang menggunakan bagan jenis ini bekerja sama dengan pemilik kapal yang bermodal besar. Selain itu, terdapat juga jenis bagan tancap dan bagan apung yang mobilitasnya rendah dan terbatas pada jenis ikan teri tertentu saja. Kedua jenis nelayan bagan ini biasanya menghabiskan waktu sekitar 25-30 hari di tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan. Hal yang berlawanan terlihat pada nelayan bagan perahu (congkel) yang menangkap ikan dalam siklus waktu semalaman.

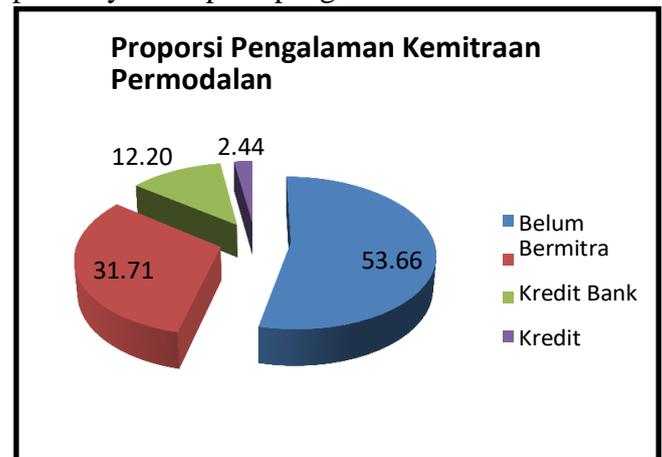
#### Aspek Permodalan

Secara umum sumber modal yang diperoleh pengolah ikan teri di Desa Kilensari dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu ;

1. Modal sendiri
2. Modal dari perbankan,
3. Bantuan modal dari pengumpul,
4. Bantuan modal dari BUMN.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebagaimana dapat diperoleh informasi bahwa sumber pembiayaan dari pihak ketiga pada usaha pengolahan ikan teri kering di Desa Kilensari ini berasal dari kredit perbankan, BUMN dan dinas Lainnya. Dinas yang mempunyai program bantuan modal yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Realisasi penyaluran dari keempat elemen *stakeholders* tersebut mencapai Rp150,000,000.00 yang terbagi secara merata untuk pengolah besar dan kecil. Namun dalam proses pengembaliannya mengalami kemacetan sehingga perbankan

lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada pengolah



Gambar 5.3 Proporsi pengalaman kemitraan

Secara umum banyak pengolah yang belum pernah berhubungan dengan perbankan, hal ini dikarenakan pengolah enggan untuk menghadapi prosedur perbankan yang terkesan rumit dan adanya penagihan setelah kredit tersebut dicairkan. Penerapan konsep kluster diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolah untuk melakukan akses kepada perbankan sekaligus melakukan pemberdayaan sehingga unit usaha dapat layak (*feasible* dan *bankable*) sehingga dapat melunasi kewajiban pembiayaan yang diterima. Pemasaran ikan teri siger telah menyebar keluar daerah seperti Surabaya, Probolinggo, Madura, Banyuwangi, Jakarta melalui tengkulak yang telah lama terbina dengan pengolah ikan teri siger, dalam hal ini mata rantainya telah terbentuk. Sehingga nilai tawar dalam pemasaran dikendalikan oleh tengkulak

Sentra Pengolahan Ikan Teri Desa Kilensari merupakan salah satu produk unggulan Kota Situbondo dan merupakan potensi yang cukup besar, maka dibentuk suatu kluster pengolahan ikan teri dalam rangka mencapai program pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan visi sentra produk ikan olahan.

#### Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir

Kekurangberdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang baru saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Uraian singkat tentang kelima program ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengembangkan Mata Pencaharian Alternatif

Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

#### 2. Akses Terhadap Modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal

bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

#### 3. Akses Terhadap Teknologi

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.

Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah.

#### 4. Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekati masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak

penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

#### 5. Pengembangan Aksi Kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.

### Analisa SWOT

Tabel 5.1 Analisis SWOT

Keunggulan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>weakness</i> ),
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang pesisir pantai di wilayah Kabupateen Barru sangat panjang, yaitu 4,98 km di Selat makasar.</li> <li>- Jumlah masyarakat yang hidup sebagai nelayan sangat banyak yaitu 14.785 jiwa.</li> <li>- Ikan laut bagi masyarakat Kilensari merupakan lauk pokok yang harus tersedia setiap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan para nelayan relatif masih rendah.</li> <li>- Posisi tawar antara nelayan dengan pemilik kapal ikan masih lemah.</li> <li>- Angin barat selama 4 bulan yang mengurangi aktivitas nelayan.</li> <li>- Mutu produk belum memadai penangannya</li> </ul>

hari.	- Pabrik tepung ikan tidak ada.
Peluang ( <i>opportunity</i> )	Tantangan ( <i>threath</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya eksistensi lembaga pemerintah (Sekolah perikanan, DKP, penyuluh, dll).</li> <li>- Adanya kadin, koperasi, USP</li> <li>- Adanya perusahaan expotir ikan.</li> <li>- Kapasitas produksi ikan belum jenuh untuk ditingkatkan.</li> <li>- Sudah ada industri penunjang/hilir:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabrik es</li> <li>- Industri krupuk ikan</li> <li>- Pabrik pakan lemak tersedia</li> <li>- Industri pengolah ikan</li> <li>- Cold storage</li> <li>- Bengkel mesin</li> <li>- Adanya pembuatan industri perahu/ kapal ikan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penangkapan ikan dengan bom dan racun.</li> <li>- Belum banyak usaha cold storrage beroperasi di wilayah Kabupaten Situbondo.</li> <li>- Kapasitas Industri pengolahan ikan dan pengeringan ikan belum besar.</li> <li>- Jasa bunga bank cukup tinggi dan tengkulak</li> <li>- Harga ikan kurang layak (rendah).</li> <li>- Rantai tata niaga panjang.</li> </ul>

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kluster

ikan di Desa Kilensari, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan yang berada di Desa Kilensari, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Fasilitator dapat memfasilitasi masyarakat dengan memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang ada agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Sumber personal, sumber interpersonal, sumber sosial. Fasilitator telah memfasilitasi dengan memberikan sarana dan prasarana terkait pengembangan klaster ikan di Desa Kilensari Panarukan.
- b. Fasilitator melalui pendampingan KUD Mina di Desa Kilensari dengan melakukan penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu, juga melakukan penguatan kelembagaan koperasi sebagai upaya penyadaran masyarakat Desa Kilensari agar termotivasi untuk berkelompok yang akhirnya mempunyai kesamaan visi dan misi dalam pencapaian kesejahteraan bersama melalui pembentukan unit usaha bersama. Penguatan dilakukan ketika ada fasilitator saja namun ketika fasilitator sudah keluar (*phasing out*) dari pengembangan klaster ini maka masyarakat Desa Kilensari kembali kepada kegiatan semula.
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Situbondo sebagai *stakeholders* untuk mendukung pengembangan klaster ikan, diantaranya dengan melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pembangunan beberapa fasilitas umum di Desa Kilensari terkait pengembangan klaster ikan di Desa

Kilensari.

d. Apa yang dilakukan fasilitator dalam program ini adalah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Kilensari, dan tidak ada upaya yang bersifat pemeliharaan atas berjalannya program pengembangan klaster ikan di Desa Kilensari ini ke depannya

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan klaster ikan di Desa Kilensari Panarukan yaitu :

- a. Sulitnya merubah pola pikir dan paradigma komunitas sasaran Komunitas pendampingan secara umum masih berpikir secara instan dimana setiap ada kegiatan program pada dasarnya harus memberikan keuntungan finansial buat mereka. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan sebagai salah satu proses penyadaran bagi komunitas masih dianggap tidak penting.
- b. Adanya keterbatasan dana. Proses pemberdayaan dalam pengembangan klaster ikan yang membutuhkan banyak dana, tidak sejalan dengan ketersediaan dana yang ada. Hal ini karena adanya keterbatasan dana dari pihak fasilitator, ditambah dengan minimnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan sokongan dana
- c. Tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah ini sangat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pesisir dikarenakan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam memahami pengetahuan terkait penyuluhan pengembangan klaster yang diberikan oleh fasilitator.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Fasilitator hendaknya memperluas fokus penyuluhan yang mereka berikan, tidak hanya monoton pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya untuk merubah pola pikir dan paradigma sebagian masyarakat yang partisipasinya terhadap program ini masih rendah.
2. Fasilitator perlu mengupayakan/memfasilitasi penghimpunan modal koperasi dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat secara merata dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan klaster-klaster usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat lainnya khususnya pada sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kedepannya masyarakat tidak akan terus bergantung pada fasilitator.
3. Pihak fasilitator dan masyarakat Kilensari, masing-masing pihak hendaknya memiliki kesadaran diri dan komitmen yang kuat untuk menjalankan pengembangan klaster ikan ini.
4. Sebaiknya Pemerintah Situbondo dapat meningkatkan pengalokasian anggaran untuk program

peremberdayaan masyarakat agar pemberdayaan dapat terealisasi secara merata dan menyeluruh

5. Meningkatkan pelatihan, pendampingan dan pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat secara berkelanjutan
6. Meningkatkan dukungan *stakeholders* kepada Desa Kilensari sebagai klaster ikan modern.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta
- Ikhsani, Fandi Winna. 2011. *Optimasi Pengelolaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Macan Pada Kelompok Sea Farming Di Pulau Panggang Kabupaten Administratif Kepulauan*. Bogor
- Lambolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Modim, Hi. Masita. 2012. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)*, Skripsi: Universitas Hasanuddin
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia <http://www.bi.go.id/umkm/lampung> (diakses pada tanggal 9 April 2019 Pukul 19.00wib)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/71741-investor-sorot-kebersihan-pulau-pasaran> (diakses pada tanggal 9 April 2019 Pukul 13.00 wib)
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Aditama
- Perundang-undangan  
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidayaan Ikan
- Wrihatnolo, Randy dan Nugroho, Riant.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Sumber Lain  
Buku Pedoman Pengembangan Klaster Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo
- Tuwo, H. Ambo. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya : Brilian Internasional
- Website  
<http://beranda-miti.com/pendekatan-pembangunan-berkelanjutan-sustainable-development-untuk-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-di-indonesia/>, (diakses tanggal 9 April 2019 Pukul 20.00 wib)

